

wonderful
indonesia



KEMENTERIAN PARIWISATA

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* TAHUN ANGGARAN 2025

POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Pariwisata NHI Bandung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pariwisata yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandung, 31 Desember 2025
Direktur Politeknik NHI Bandung

ANWARI MASATIP
NIP. 197504152002121001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akuntansi	7
A.4 Dasar Pengukuran	7
A.5 Kebijakan Akuntansi	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1 Pendapatan	11
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	11
B.2 Belanja	12
B.2.1 Belanja Pegawai	13
B.2.2 Belanja Barang	13
B.2.3 Belanja Modal	14
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	16
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	16
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	16
C.3 Piutang Bukan Pajak	16
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	16
C.5 Persediaan	17
C.6 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	17
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	17
C.8 Tanah	18
C.9 Peralatan dan Mesin	18
C.10 Gedung dan Bangunan	18
C.11 Jalan, Irigasi dan Jaringan	19
C.12 Aset Tetap Lainnya	19
C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	19
C.14 Properti Investasi	19
C.15 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	20
C.16 Aset Tak Berwujud	20
C.17 Aset Lain-lain	20
C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	21
C.19 Utang kepada Pihak Ketiga	21
C.20 Pendapatan Diterima Dimuka	21
C.21 Uang Muka dari KPPN	21
C.22 Utang Jangka Pendek Lainnya	22
C.23 Ekuitas	22
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	23
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	23
D.2 Beban Pegawai	23
D.3 Beban Persediaan	23
D.4 Beban Barang dan Jasa	24
D.5 Beban Pemeliharaan	24
D.6 Beban Perjalanan Dinas	25
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	25
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	25

D.9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	26
D.10	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	26
D.11	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	26
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	27
E.1	Ekuitas Awal	27
E.2	Surplus (Defisit) LO	27
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	27
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	27
E.5	Transaksi Antar Entitas	27
E.6	Ekuitas Akhir	28
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	29
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bandung, 31 Desember 2025
Direktur Poltekpar NHI Bandung



ANWARI MASATIP
NRP. NIP. 197504152002121001



RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Politeknik Pariwisata NHI Bandung Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.806.255.424 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.806.255.424 atau mencapai 126,84 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp12.461.900.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp114.201.401.043 atau mencapai 95,55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp119.516.412.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.385.557.826.743 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp352.448.679; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp2.350.603.850.421 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp34.601.527.643.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.362.965.086 dan Rp2.384.194.861.657

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.161.790.741 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp127.487.729.079 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-113.325.938.338, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp422.282.756 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-112.903.655.582.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-112.903.655.582 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 250.580.931 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 2.496.847.936.308 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp2.384.194.861.657

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.461.900.000	15.806.255.424	126,84	-
JUMLAH PENDAPATAN		12.461.900.000	15.806.255.424	126,84	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	41.097.296.000	39.215.159.133	95,42	-
Belanja Barang	B.2.2	67.384.116.000	63.963.988.708	94,92	-
Belanja Modal	B.2.3	11.035.000.000	11.022.253.202	99,88	-
JUMLAH BELANJA		119.516.412.000	114.201.401.043	95,55	-

Bandung, 31 Desember 2025
Direktur Poltekpar NHI Bandung


ANWARI MASATIP
NIP. 197504152002121001

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	14.161.790.741	-
Jumlah Pendapatan		14.161.790.741	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	39.095.430.523	-
Beban Persediaan	D.3	11.141.976.064	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	35.357.974.424	-
Beban Pemeliharaan	D.5	9.065.801.720	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	7.966.005.557	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	24.860.540.791	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	0
Jumlah Beban		127.487.729.079	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(113.325.938.338)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	199.790.000	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	222.492.756	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		422.282.756	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(112.903.655.582)	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(112.903.655.582)	-

Bandung, 31 Desember 2025
 Direktur Poltekpar NHI Bandung


ANWARI MASATIP
 NIP. 197504152002121001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(112.903.655.582)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	250.580.931	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.41	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.42	250.493.306	-
Koreksi Lain-Lain	E.43	87.625	-
Jumlah		250.580.931	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.496.847.936.308	-
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.384.194.861.657	-
EKUITAS AKHIR	E.6	2.384.194.861.657	-

Bandung, 31 Desember 2025
Direktur Poltekpar NHI Bandung


ANWARI MASATIP
NIP. 197504152002121001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2	48.806.000	-
Persediaan	C.5	303.642.679	-
Jumlah Aset Lancar		352.448.679	-
ASET TETAP			
Tanah	C.8	1.904.311.781.000	-
Peralatan dan Mesin	C.9	129.810.725.250	-
Gedung dan Bangunan	C.10	461.105.933.611	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.11	16.258.238.906	-
Aset Tetap Lainnya	C.12	2.896.732.095	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.13	6.873.264.918	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.14	(170.652.825.359)	-
Jumlah Aset Tetap		2.350.603.850.421	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	915.187.810	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.17	569.535.100	-
Aset Lain-lain	C.18	35.902.637.192	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(2.785.832.459)	-
Jumlah Aset Lainnya		34.601.527.643	-
JUMLAH ASET		2.385.557.826.743	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	692.412.511	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.21	670.552.575	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.362.965.086	-
JUMLAH KEWAJIBAN		1.362.965.086	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.23	2.384.194.861.657	-
JUMLAH EKUITAS		2.384.194.861.657	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.385.557.826.743	-

Bandung, 31 Desember 2025

Direktur Politeknik NHI Bandung



ANWARI MASATIP

NIP. 197504152002121001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Politeknik Pariwisata NHI Bandung (sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi Dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 186, Bandung. Politeknik Pariwisata NHI Bandung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Politeknik Pariwisata NHI Bandung berkomitmen dengan visi "mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel Dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan

A.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 12.461.900.000	Rp 12.461.900.000
Jumlah Pendapatan	Rp 12.461.900.000	Rp 12.461.900.000
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 41.097.296.000	Rp 41.097.296.000
Belanja Barang	Rp 67.384.116.000	Rp 67.384.116.000
Belanja Modal	Rp 11.035.000.000	Rp 11.035.000.000
Jumlah Belanja	Rp 119.516.412.000	Rp 119.516.412.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.806.255.424 atau mencapai 126,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.461.900.000. Pendapatan Politeknik Pariwisata NHI Bandung terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.806.255.424. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Adapun realisasi pendapatan melebihi target disebabkan adanya pengembalian belanja TAYL. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 12.461.900.000	Rp 15.806.255.424	126,84
Jumlah	Rp 12.461.900.000	Rp 15.806.255.424	126,84

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 15.806.255.424	Rp -	0,00
Jumlah	Rp 15.806.255.424	Rp -	0,00

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp15.806.255.424 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dari TA 2024 Terjadi kenaikan pendapatan pada TA 2025 sebesar 100 % disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	Rp 15.806.255.424	Rp -	0,00
Jumlah	Rp 15.806.255.424	Rp -	0,00

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	253.543.000	-	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2	-	0,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	695.500.000	-	0,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.562.275.000	-	0,00
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.868.364.628	-	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	45.756.645	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	215.492.756	-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	199.790.000	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7.000.000	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	958.533.393	-	0,00
Jumlah	15.806.255.424	-	0,00

Realisasi Belanja
Rp114.201.401.043

B.2 Belanja

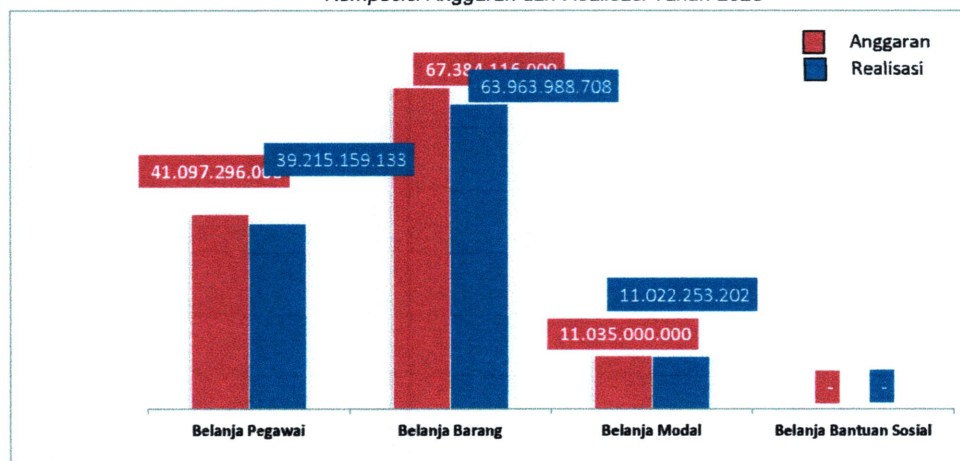
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp114.201.401.043 atau 95,55 % dari anggaran belanja sebesar Rp.119.516.412.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	41.097.296.000	39.215.159.133	95,42
Belanja Barang	67.384.116.000	63.963.988.708	94,92
Belanja Modal	11.035.000.000	11.022.253.202	99,88
Jumlah	119.516.412.000	114.201.401.043	95,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00%. Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	39.215.159.133	-	0,00
Belanja Barang	63.963.988.708	-	0,00
Belanja Modal	11.022.253.202	-	0,00
Jumlah	114.201.401.043	-	0,00

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp39.215.159.133

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.215.159.133 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025 dan dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	12.158.874.000	-	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	147.233	-	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	848.254.860	-	0,00
Belanja Tunj. Anak PNS	209.409.869	-	0,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	63.190.000	-	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.144.385.000	-	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	149.403.049	-	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	559.926.260	-	0,00
Belanja Uang Makan PNS	1.754.634.391	-	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	224.095.000	-	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	5.116.185.585	-	0,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	1.884.187.054	-	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32.289	-	0,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	133.434.682	-	0,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	38.726.545	-	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	182.456.247	-	0,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	116.885.880	-	0,00
Belanja Uang Makan PPPK	358.092.000	-	0,00
Belanja Uang Lembur	11.450.000	-	0,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Ke	12.130.472.526	-	0,00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiat	2.132.769.348	-	0,00
Jumlah Belanja kotor	39.217.011.818	-	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	1.852.685	-	0,00
Jumlah Belanja	39.215.159.133	-	0,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp63.963.988.708 dan Rp0. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025 dan dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	14.322.512.454	-	0,00
Belanja Barang Non Operasional	6.516.590.302	-	0,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11.895.410.566	-	0,00
Belanja Jasa	14.704.663.371	-	0,00
Belanja Pemeliharaan	8.710.241.458	-	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.469.080.368	-	0,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	678.761.629	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	64.297.260.148	-	0,00
Pengembalian Belanja	333.271.440	-	0,00
Jumlah Belanja	63.963.988.708	-	0,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.022.253.202 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025 dan dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 sehingga terjadi cut off yang

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.644.431.800	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.322.139.237	-	0,00
Belanja Modal Lainnya	55.682.165	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	11.022.253.202	-	0,00
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	11.022.253.202	-	0,00

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.644.431.800 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025 dan dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.644.431.800	-	0,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	5.644.431.800	-	0,00
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	5.644.431.800	-	0,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.322.139.237 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025 dan dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.157.327.531	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan	-	-	-
Belanja Modal Perencanaan dan	164.811.706	-	-
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	5.322.139.237	-	-
Pengembalian Belanja	-	0	0
Jumlah Belanja	5.322.139.237	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp55.682.165 dan Rp0, sebesar % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan belanja di tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025 dan dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024..

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	55.682.165	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau	0	-	-
Jumlah Belanja Kotor	55.682.165	-	-
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	55.682.165	-	-

B.2.3.4 Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Adanya perubahan nomenklatur kementerian pada bulan Juni 2025 mengakibatkan tidak adanya realisasi anggaran pada tahun 2024, tetapi realisasi anggaran tahun 2024 tercatat di satuan kerja lama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Realisasi tahun 2025 dicatat di satuan kerja baru dibawah kementerian pariwisata dan sudah dilakukan likuidasi.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp14.161.790.741 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan Terjadi kenaikan pendapatan pada TA 2025 sebesar 100 % disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	249.240.425	-	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2	-	0,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	695.500.000	-	0,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.263.923.041	-	0,00
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.907.370.628	-	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	45.756.645	-	0,00
Jumlah	14.161.790.741	-	0,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.095.430.523 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan Terjadi kenaikan beban pegawai pada TA 2025 sebesar 100 % disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	12.158.698.400	-	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	145.152	-	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	848.254.860	-	0,00
Beban Tunj. Anak PNS	209.409.869	-	0,00
Beban Tunj. Struktural PNS	63.190.000	-	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.144.385.000	-	0,00
Beban Tunj. PPh PNS	149.403.049	-	0,00
Beban Tunj. Beras PNS	559.926.260	-	0,00
Beban Uang Makan PNS	1.754.634.391	-	0,00
Beban Tunjangan Umum PNS	223.354.944	-	0,00
Beban Tunjangan Profesi Dosen	5.116.185.585	-	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.883.252.106	-	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	32.289	-	0,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	133.434.682	-	0,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	38.726.545	-	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	182.456.247	-	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	116.885.880	-	0,00
Beban Uang Makan PPPK	358.092.000	-	0,00
Beban Uang Lembur	11.450.000	-	0,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12.010.743.916	-	0,00
Beban PegawaiTunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja PP	2.132.769.348	-	0,00
Jumlah	39.095.430.523	-	0,00

Beban Persediaan
Rp11.141.976.064

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.141.976.064 dan Rp0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Terjadi kenaikan belanja pada TA 2025 sebesar 100 % disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	4.398.126.142	-	0,00
Beban Persediaan bahan baku	6.696.839.425	-	0,00
Beban Persediaan Lainnya	47.010.497	-	0,00
Jumlah Beban Persediaan	11.141.976.064	-	0,00

Beban Barang dan Jasa
Rp35.357.974.424

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.357.974.424 dan Rp0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Terjadi kenaikan beban barang dan jasa pada TA 2025 sebesar 100 % disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	14.010.249.315	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.483.139	-	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	290.700.000	-	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	19.680.000	-	0,00
Beban Bahan	2.172.526.886	-	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	3.147.551.866	-	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.144.846.550	-	0,00
Beban Langganan Listrik	1.357.956.272	-	0,00
Beban Langganan Telepon	13.725.502	-	0,00
Beban Jasa Konsultansi	114.972.000	-	0,00
Beban Sewa	1.122.397.773	-	0,00
Beban Jasa Profesi	996.470.000	-	0,00
Beban Jasa Lainnya	10.982.580.247	-	0,00
Jumlah	35.357.974.424	-	0,00

2025
Rp0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.065.801.720 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Terjadinya kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.351.626.925	-	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.161.001.455	-	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	553.173.340	-	0,00
Jumlah	9.065.801.720	-	0,00

2025
Rp0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.966.005.557 dan Rp0

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen disebabkan oleh Adanya kenaikan beban perjalanan dinas di Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	6.457.189.716	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	414.309.092	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	470.378.060	-	0,00
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	624.128.689	-	0,00
Jumlah	7.966.005.557,00	-	0,00

2025
Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	0	0,00
Jumlah	-	0	0,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.860.540.791 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.408.986.745	-	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.032.767.670	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	0,00
Beban Penyusutan Irigasi	10.748.743	-	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.321.667.334	-	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digun	39.944.049	-	0,00
Jumlah Penyusutan	24.814.114.541	-	0,00
Beban Amortisasi Software	45.926.250	-	0,00
Beban Amortisasi Paten	500.000	-	0,00
Jumlah Amortisasi	46.426.250	-	0,00
Jumlah	24.860.540.791	-	0,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	0,00
Jumlah	-	-	0,00

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp199.790.000 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	199.790.000	-	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	0,00
Jumlah	199.790.000	-	0,00

Pendapatan dan penjualan peralatan dan mesin diperoleh dari penjualan 4 kendaraan melalui lelang.

Adapun jenis kendaraannya yaitu Toyota Vios, Toyota Avanza 2 unit, dan Triseda.

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp222.492.756

D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp222.492.756 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	7.000.000	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	215.492.756	-	-
Jumlah	222.492.756	-	-

Penerimaan Kembali Pegawai TAYL diperoleh dari pengembalian kelebihan uang lembur tahun 2017 sebesar 7.000.000 sedangkan pengembalian belanja barang TAYL sebesar Rp.215.492.756.

Adapun rincian dari Pengembalian Belanja TAYL dapat dilihat pada Lampiran Pengembalian Belanja.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-112.903.655.582,00 dan Rp.0,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.250.580.931 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

E.4.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

E.4.2 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.250.493.306 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	250.493.306
Jumlah	250.493.306

E.4.3 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.87.625 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Koreksi Lainnya disebabkan adanya penyesuaian nilai piutang PNBPNP.. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	87.625
Jumlah	87.625

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.496.847.936.308 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	114.201.401.043
Diterima dari Entitas Lain	(15.806.255.424)
Transfer Masuk	2.398.220.464.332
Pengesahan Hibah Langsung	232.326.357
Jumlah	2.496.847.936.308

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 114.201.401.043, sedangkan DDEL sebesar Rp 15.806.255.424

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
0	0	0
0	0	0
Jumlah		0

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.398.220.464.332 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Transfer Masuk dari Satuan Kerja Lama	0	2.398.220.464.332
Jumlah		2.398.220.464.332

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 231.326.357 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.: Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.: Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.: Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima
Rp48.806.000

C.: Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp48.806.000. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	48.806.000	-
Jumlah	48.806.000	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Pendapatan yang masih harus diterima berupa sewa lahan Danpac bulan Agustuss.d Desember 2025 sebesar Rp.300.000 @ 6 mesin * 5 bulan Rp.9.000.000,- dan dibayar Januari 2026. Sewa kamar IBC sebesar Rp.39.806.000 yang belum dibayarkan ke NHI Hotel

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	0	0
Piutang Pengembalian Tunjangan Kinerja	0	0
Jumlah	0	0

Adanya likuidasi masuk pada bulan Juni 2025 berupa piutang bukan pajak sebesar Rp.17.525.000 dengan No BAST B/SD/375/KU/PTP.1/2025 tetapi telah dilakukan pembayaran piutang seluruhnya pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan 7 billing disertai dengan No NTPN sebagai berikut 3B8AC48VVOISG4B2, EA9117QLV2SE43PM, BCE238N3ETEQH6OD, EC3917QLV2SE46U0, BAD6155DFJ58T1MN, B736B6U8F8A1N2F5, dan A25F01JNG8RN97HF sehingga nilai piutang yang tercatat di neraca per 31 Desember 2025 sudah tidak ada.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	%	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		1%	
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	-	-

Persediaan
Rp303.642.679

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp303.642.679 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	248.889.177	-
Bahan untuk Pemeliharaan	28.857.350	-
Bahan Baku	22.127.876	-
Persediaan Lainnya	3.768.276	-
Jumlah	303.642.679	-

Persediaan tersebut mengalami Adanya kenaikan nilai persediaan Tahun 2025 sebesar 100% disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur dari nama kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kementerian pariwisata di bulan Juni 2025, sehingga terjadi cut off yang menyebabkan tidak adanya realisasi di Tahun 2024

C.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.904.311.781.000 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Adanya penambahan nilai dari likuidasi masuk satuan kerja lama atas tanah sebesar Rp.1.904.311.781.000. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Likuidasi Masuk	1.904.311.781.000
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.904.311.781.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1820	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II (Jl. Hegarmanah No. 95)	23.836.627.000
2	301	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2.700.605.000
3	427	Lahan Pintu Gerbang Pos II (Jl. Dr.Setiabudhi No.186)	10.308.836.000
4	341	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Jl. Radio Dayeuh Kolot)	919.659.182.000
5	40610	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Jl. Dr.Setiabudhi No.186)	111.671.614.000
6	98750	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Jl. Dr.Setiabudhi No.186)	271.548.188.000
7	426	Lahan Pintu Gerbang Pos II (Jl. Dr.Setiabudhi No.186)	10.284.693.000
8	201575	Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan (Citeureup Dayeuh Kolot Kab. Bandung)	554.302.036.000
Jumlah			1.904.311.781.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Nilai tanah tersebut diperoleh dari adanya likuidasi masuk dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025 sebesar Rp.1.904.311.781.000.

C.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp129.810.725.250 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	122.371.130.620
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.585.440
Perolehan Lainnya	5.115.248.254
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5.244.321.359
Pembelian	690.713.881
Hibah (Masuk)	225.467.267
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	2.098.756.800
Reklasifikasi Masuk	29.804.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	5.231.507.371
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	40.000.000
Koreksi Pencatatan	699.795.000
Saldo per 31 Desember 2025	129.810.725.250
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(97.152.827.263)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	32.657.897.987

Mutasi transaksi penambahan dan Pengurangan peralatan mesin berupa:

Penambahan peralatan dan mesin berupa likuidasi masuk dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025 tanggal 26 Juni 2025 sebesar Rp.122.371.130,620

Adanya penambahan nilai sebesar Rp.6.585,440 dari koreksi pencatatan nilai berupa CCTV dan matras, Rp.5.115,248,254 dari perolehan lainnya berupa rak besi, rak gantung, kursi besi/metal dll, Rp5.244.321.359 dari penyelesaian pengembangan dengan KDP berupa meja kerja kayu dan dish washer, Rp.690.713.881 berupa pompa air, mesin absensi, AC dll, Pembelian sebesar Rp.225.467.267 berupa lemari kayu, pintu, kursi, kasur, meja, TV dll, Penggunaan kembali BMN Rp.2.098,756,800 berupa mesin cuci, lemari es, oven gas, coffee maker dll, dan Reklasifikasi Masuk Rp.29.804,000 berupa tenda. Selain itu, ada juga koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp.5.231.507,371 berupa Alat Prosesing Daging, Meja Kerja Kayu, A.C. Split, Alat Penyaring, Dish Washer dan Matras. Selain itu ada pengurangan berupa pengentian aset dari penggunaan sebesar Rp.40.000.000 berupa Kompor Gas (Alat Dapur), Oven Listrik, Mixer dan Oven Gas. Rp.699.795.000 pengurangan koreksi pencatatan sarana praktik berupa Wall Panel, Rak Ambalan, dan Pintu sebesar Rp.699.795.000 yang menempel pada bangunan gedung kampus dan tidak memenuhi klasifikasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Rincian detail untuk penambahan peralatan dan mesin ada pada Lampiran Aset Tetap.

C.1 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.461.105.933,611 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	5.106.846.613
Likuidasi Masuk	455.523.178.827
Koreksi Susulan	1.149.089.696
Pengembangan Nilai Aset	118.007.768
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	791.189.293
Saldo per 31 Desember 2025	461.105.933.611
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(68.511.521.709)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	392.594.411.902

Penambahan nilai gedung bangunan diantaranya melalui pengembangan melalui KDP sebesar Rp.5.106.846.613 berupa pagar permanen, likuidasi masuk dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025 tanggal 26 Juni 2025 sebesar Rp.455,523,178,827 berupa bangunan gedung kantor permanen, Bangunan Gudang Tertutup Permanen, Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen dll, Koreksi Susulan sebesar Rp.251,681,618 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan pendidikan permanen serta pagar ditambah Rp.197.613,078 berupa pengerasan lantai Gedung I Gede Ardika dan ditambah Rp.699.795.000 berupa Wall Panel, Rak Ambalan, dan Pintu. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp.118,007,768 berupa pagar permanen. Sedangkan pengurangan nilai diperoleh dari adanya koreksi pencatatan nilai berkurang Rp.791,189,293 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan pendidikan permanen, gedung olahraga, gazebo, hotel dan pagar permanen. Adapun rincian penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran Aset Tetap.

C.1 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.16.258.238.906 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	16.491.497.906
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	233.259.000
Saldo per 31 Desember 2025	16.258.238.906
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.747.159.287)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	11.511.079.619

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

Penambahan sebesar Rp.16.491.497.906 disebabkan adanya nilai likuidasi masuk dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025 tanggal 26 Juni 2025 yang terdiri dari Jaringan Rp.14,013,004,146, Irigasi Rp.2,245,234,760, Jembatan dan Jalan Rp.233,259,000.

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Pengurangan sebesar Rp.233,259,000 berupa koreksi pencatatan jalan dan jembatan.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo per 31 Desember 2025
Rp. 2.896.732.095

C.1 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	2.893.925.737
Hibah (Masuk)	2.806.358
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	2.896.732.095
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(241.317.100)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.655.414.995

Mutasi tambah/kurang: Adanya penambahan berupa hibah masuk sebesar Rp.2.806.358 berupa lukisan kanvas. Likuidasi masuk aset tetap lainnya dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025 tanggal 26 Juni 2025 sebesar Rp.2.893.925.737 berupa monografi, referensi, buku lainnya, alat musik modern dan lukisan cat minyak.

Saldo per 31 Desember 2025
Rp. 6.873.264.918

C.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6.873.264.918 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Penambahan KDP berasal dari Perolehan/Penambahan KDP Rp1.617.989.707, likuidasi masuk dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025 sebesar Rp.7.097.257.520, serta pengembangan KDP sebesar Rp.8.582.259.374. Sedangkan mutasi kurang antara lain koreksi nilai KDP Berkurang Rp.7.000.000, Koreksi Pencatatan KDP Rp.66.073.711, Pengembangan melalui KDP Rp.5.106.846.613 berupa pagar permanen, dan penyelesaian pembangunan dengan KDP Rp.5.244.321.359 berupa meja kerja kayu dan dish washer. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	7.097.257.520
Perolehan/Penambahan KDP	1.617.989.707
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	6.873.264.918

Saldo per 31 Desember 2025
Rp. 170.652.825.359

C.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp170.652.825.359 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	129.810.725.250	(97.152.827.263)	32.657.897.987
2	Gedung dan Bangunan	461.105.933.611	(68.511.521.709)	392.594.411.902
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.258.238.906	(4.747.159.287)	11.511.079.619
4	Aset Tetap Lainnya	2.896.732.095	(241.317.100)	2.655.414.995
	Akumulasi Penyusutan	610.071.629.862	(170.652.825.359)	439.418.804.503

C.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp915.187.810 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung berupa .

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	915.187.810
Mutasi Kurang:	
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	915.187.810
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(545.375.875)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	369.811.935

Rincian Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud	Nilai
Paten	5.000.000
Software Komputer	566.589.000
Aset Tak Berwujud Lainnya	343.598.810
Jumlah	915.187.810

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

Adanya penambahan aset tak berwujud sebesar Rp.915.187.810 yang diperoleh dari likuidasi masuk dari satker lama 427451 ke satker baru 694453 dengan No BAST BA/14/PL.02/PTP.1/2025.

C.1 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp569.535.100 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	569.535.100	-
Total	569.535.100	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana RPATA dengan pembayaran di tahun 2026 yang terdiri dari Pekerjaan General Pest Control, Pengadaan Internet Service Provider, Pemeliharaan Lift Periode Juli-Desember 2025, Pemeliharaan Unit Lift Enhai Hotel, Sewa Layanan Sevima Platform, Pengadaan Jasa Satuan Pengamanan, dan Pengadaan Jasa Cleaning Service.

C.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp35.902.637,192 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Likuidasi Masuk	35.902.637,192
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2025	35.902.637,192
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(2.240.456.584)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	33.662.180.608

C.1 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp2.785.832.459 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	915.187.810	(545.375.875)	369.811.935
Aset Lain-lain	35.902.637.192	(2.240.456.584)	33.662.180.608
Total	36.817.825.002	(2.785.832.459)	34.031.992.543

C.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp692.412.511 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.447.300	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	118.430.111	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	569.535.100	-
Total	692.412.511	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa tunjangan kinerja Susulan bulan Desember 2025 tahun 2025 untuk 2 Pegawai an. Lien Maulina dan Eka paramita marsongko sebesar Rp.4.447.300, beban barang yang masih harus dibayar sebesar Rp.118.430.111 terdiri dari beban listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp.115.830.111 dan beban langganan TV kabel hotel bulan Desember 2025 sebesar Rp.2.600.000 yang baru dibayarkan di bulan Januari 2026. Selain itu ada utang kepada pihak ketiga lainnya berupa RPATA sebesar Rp.569.535.100. Adapun rincian RPATA akan dilampirkan pada Laporan Keuangan ini.

C.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp670.552.575 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Pendapatan Diterima Dimuka	4.302.575	-
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	666.250.000	-
Total	670.552.575	-

Penjelasan tentang pendapatan diterima dimuka terdiri dari pendapatan sewa diterima dimuka berupa sewa atm bank bri dengan periode sewa bulan 2 April 25 sd 2 April 26, maka pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Januari s.d Maret 26 sebesar Rp.4.302.575. Sedangkan untuk pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka diperoleh dari mahasiswa baru Program B yang sudah membayar kuliah di bulan Juli 2025, tetapi mahasiswa program B melakukan matrikulasi bahasa inggris terlebih dahulu selama 6 bulan dan baru akan berkuliah di Semester 1 pada bulan Januari 2026, sehingga pendapatan diterima dimuka mahasiswa program B sebanyak 325 orang dikali tarif biaya pendidikan dan perkuliahan sebesar Rp.2.050.000 dengan nilai total Rp.666.250.000.

C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.384.194.861.657. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a) Tanah dan Rumah Dinas Jalan Dr. Setiabudhi

Tanah dan Rumah Dinas yang berlokasi di Jl. Dr. Setiabudhi No. 186 sebagian statusnya sudah menjadi hak milik pribadi, terdiri dari :

1. Drs. Denny Sugiri (479 m2 dengan sertifikat Nomor 2680 tanggal 04 Oktober 2010)
2. Drs. Herry Ryana, M.Pd (577 m2 dengan sertifikat Nomor 2567 tanggal 06 Januari 2010)
3. Drs. I Gusti Putu Laksaguna, CHA, M.Sc (272 m2 dengan sertifikat Nomor 2609 tanggal 27 April 2010)
4. Drs. Parlan Sulistyono, MBA (437 m2 dengan sertifikat Nomor 2982 tanggal 13 Januari 2014)
5. Drs. Wagiono, M.Pd (461 m2 dengan sertifikat Nomor 2572 tanggal 01 Februari 2010)
6. Drs. Tatang Rukhiyat (605 m2 dengan sertifikat Nomor 2676 tanggal 15 September 2010)
7. Slamet Mulyono (521 m2 dengan sertifikat Nomor 2996 tanggal 02 Mei 2014)
8. Drs. Suseno Kardigantara (471 m2 dengan sertifikat Nomor 3029 tanggal 09 Januari 2015)
9. Rochadi, SH (464 m2 dengan sertifikat Nomor 2954 tanggal 17 September 2013)
10. Drs. Demson RH. Goeltom, M.Pd (754 m2 dengan sertifikat Nomor 2662 tanggal 05 Juli 2010)
11. Drs. Maman Lukman Supardi, M.Pd (225 m2 dengan sertifikat Nomor 2663 tanggal 05 Juli 2010)
12. Drs. Saiful Adi, M.Pd (324 m2 dengan sertifikat Nomor 3019 tanggal 24 Oktober 2014)
13. Drs. George Mongula (261 m2 dengan sertifikat Nomor 2667 tanggal 13 Agustus 2010)
14. Drs. Rachmat Solahuddin (296 m2 dengan sertifikat Nomor 2664 tanggal 05 Juli 2010)
15. Drs. Denny Mustofa (457 m2 dengan sertifikat Nomor 3029 tanggal 09 Januari 2015)

Sedangkan sisanya 5 rumah belum memiliki sertifikat hak milik/masih dalam pengurusan dan masih dalam masa sewa beli. Tanah dan Rumah Dinas tersebut sudah dihentikan dari penggunaan dan sedang diusulkan penghapusannya kepada Pengguna Barang.

b. Tanah dan Rumah Dinas Geger Kalong

Tanah di Jl. Gegerkalong seluas 1.784 m2 terdiri dari rumah dinas dosen STP Bandung 1.483 m2 dan tanah kosong/jalan umum 301 m2. Rumah dinas berjumlah 5 unit. 4 rumah dinas statusnya sudah berubah menjadi sertifikat hak milik pribadi, sedangkan 1 rumah dinas lagi belum berubah status menjadi sertifikat hak milik seluas 330 m2. Rumah dinas di atas berstatus golongan I pada tahun 1994 lalu berubah menjadi rumah negara golongan II berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : Km.10/PL.302/MPPT-94. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pengembangan Permukiman No. 322/KPTS-RN/DM/2000, seluruh rumah dinas tersebut telah berubah status dari rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III. Tanah dan Rumah Dinas tersebut sudah dihentikan dari penggunaan dan sedang diusulkan penghapusannya kepada Pengguna Barang.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Anwari Masatip
Pejabat Pembuat Komitmen	: Budi Setiawan dan Mohamad Ridwan
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Fitria Mahmudah
Bendahara Pengeluaran	: Tanty Ayu Astari
Bendahara Penerimaan	: Desy Mulyasari

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Anwari Masatip
Pejabat Pembuat Komitmen	: Budi Setiawan dan Mohamad Ridwan
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Fitria Mahmudah
Bendahara Pengeluaran	: Anifa Dewi Khairunisa
Bendahara Penerimaan	: Desy Mulyasari

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	48,806,000	0	48,806,000	0.00
Persediaan	303,642,679	0	303,642,679	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	352,448,679	0	352,448,679	
ASET TETAP				
Tanah	1,904,311,781,000	0	1,904,311,781,000	0.00
Peralatan dan Mesin	129,810,725,250	0	129,810,725,250	0.00
Gedung dan Bangunan	461,105,933,611	0	461,105,933,611	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	16,258,238,906	0	16,258,238,906	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,896,732,095	0	2,896,732,095	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6,873,264,918	0	6,873,264,918	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(170,652,825,359)	0	(170,652,825,359)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	2,350,603,850,421	0	2,350,603,850,421	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	915,187,810	0	915,187,810	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	569,535,100	0	569,535,100	0.00
Aset Lain-lain	35,902,637,192	0	35,902,637,192	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,785,832,459)	0	(2,785,832,459)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	34,601,527,643	0	34,601,527,643	
JUMLAH ASET	2,385,557,826,743	0	2,385,557,826,743	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	692,412,511	0	692,412,511	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	670,552,575	0	670,552,575	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,362,965,086	0	1,362,965,086	
JUMLAH KEWAJIBAN	1,362,965,086	0	1,362,965,086	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,384,194,861,657	0	2,384,194,861,657	0.00
JUMLAH EKUITAS	2,384,194,861,657	0	2,384,194,861,657	
JUMLAH EKUITAS	2,384,194,861,657	0	2,384,194,861,657	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,385,557,826,743	0	2,385,557,826,743	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Null



ANWARI MASATIP

197504152002121001 / 197504152002121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
 ESELON I : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,161,790,741	0	14,161,790,741	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	14,161,790,741	0	14,161,790,741	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	14,161,790,741	0	14,161,790,741	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	39,095,430,523	0	39,095,430,523	
Beban Persediaan	11,141,976,064	0	11,141,976,064	
Beban Barang dan Jasa	35,357,974,424	0	35,357,974,424	
Beban Pemeliharaan	9,065,801,720	0	9,065,801,720	
Beban Perjalanan Dinas	7,966,005,557	0	7,966,005,557	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
 ESELON I : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
 Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	24,860,540,791	0	24,860,540,791	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	127,487,729,079	0	127,487,729,079	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(113,325,938,338)	0	(113,325,938,338)	()
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	199,790,000	0	199,790,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	199,790,000	0	199,790,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	222,492,756	0	222,492,756	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	222,492,756	0	222,492,756	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	422,282,756	0	422,282,756	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(112,903,655,582)	0	(112,903,655,582)	()
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(112,903,655,582)	0	(112,903,655,582)	()

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 6 Mei 2026

Pertanggung Jawab UAKPA



ANWARI MASATIP

197604152002121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(112,903,655,582)	0	(112,903,655,582)	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	250,580,931	0	250,580,931	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	250,493,306	0	250,493,306	0
LAIN-LAIN	87,625	0	87,625	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,496,847,936,308	0	2,496,847,936,308	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,384,194,861,657	0	2,384,194,861,657	0
EKUITAS AKHIR	2,384,194,861,657	0	2,384,194,861,657	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	48,806,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	248,889,177	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	28,857,350	0
0.0	117131	Bahan Baku	22,127,876	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	3,768,276	0
0.0	131111	Tanah	1,904,311,781,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	129,810,725,250	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	461,105,933,611	0
0.0	134112	Irigasi	2,245,234,760	0
0.0	134113	Jaringan	14,013,004,146	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,896,732,095	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	6,873,264,918	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	97,152,827,263
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	68,511,521,709
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	2,148,496,073
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,598,663,214
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	241,317,100
0.0	162141	Paten	5,000,000	0
0.0	162151	Software	566,589,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	343,598,810	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	569,535,100	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	35,902,637,192	0
0.0	168122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,240,456,584
0.0	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	0	1,750,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	543,625,875
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	4,447,300
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	118,430,111
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	569,535,100
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	4,302,575
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	666,250,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	114,201,401,043
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	15,806,255,424	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	2,398,220,464,332
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	250,493,306
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	87,625
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	232,326,357
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	199,790,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	249,240,425

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:09 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	695,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	11,263,923,041
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,907,370,628
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	45,756,645
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	215,492,756
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	12,158,698,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	145,152	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	848,254,860	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	209,409,869	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,190,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,144,385,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	149,403,049	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	559,926,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,754,634,391	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	223,354,944	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	5,116,185,585	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,883,252,106	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	32,289	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	133,434,682	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	38,726,545	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	182,456,247	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	116,885,880	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	358,092,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	11,450,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,010,743,916	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,132,769,348	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	14,010,249,315	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,483,139	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	290,700,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	19,680,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,172,526,886	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,147,551,866	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,144,846,550	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	20,165,126
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,357,956,272	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:09 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,725,502	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	114,972,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,122,397,773	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	996,470,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	10,982,580,247	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,351,626,925	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,161,001,455	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	6,457,189,716	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	414,309,092	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	470,378,060	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	624,128,689	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,408,986,745	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12,032,767,670	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	10,748,743	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,321,667,334	0
3.0	592114	Beban Amortisasi Paten	500,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	45,926,250	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	39,944,049	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,398,126,142	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	553,173,340	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	6,696,839,425	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	47,010,497	0
JUMLAH			2,702,310,634,190	2,702,310,634,190

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 6 Mei 2026

Pangung Jawab UAKPA



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	114,201,401,043
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	15,806,255,424	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	199,790,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	253,543,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	695,500,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	11,562,275,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,868,364,628
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	45,756,645
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,000,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	215,492,756
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	958,533,393
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,158,874,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,233	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	848,254,860	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	209,409,869	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,190,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,144,385,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	149,403,049	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	559,926,260	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,754,634,391	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	224,095,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	5,116,185,585	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,884,187,054	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	32,289	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	133,434,682	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	38,726,545	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	182,456,247	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	116,885,880	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	358,092,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,450,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,130,472,526	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,132,769,348	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14,007,649,315	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,483,139	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	290,700,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,680,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (147) KEMENTERIAN PARIWISATA
UNIT ORGANISASI : (01) KEMENTERIAN PARIWISATA
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (694453) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Tgl Data : 06/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 9:09 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Belanja Bahan	2,172,526,886	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,198,361,866	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,144,846,550	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	855,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,895,410,566	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,373,892,849	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,725,502	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	213,797,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,122,397,773	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	998,270,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,982,580,247	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,549,240,003	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,161,001,455	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,577,533,216	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	421,169,092	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	470,378,060	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	678,761,629	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,644,431,800	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,157,327,531	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	164,811,706	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	55,682,165	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	175,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,081
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,056
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	934,948
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	50,810,000
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	98,825,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	1,800,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	120,343,500
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	6,860,000
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	54,632,940
JUMLAH			130,342,780,592	130,342,780,592

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA 147
ESELON I : KEMENTERIAN PARIWISATA 01
SATUAN KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG 694453

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
2. Dana Alokasi Umum		0	0	0		0	0	0
3. Dana Transfer Khusus		0	0	0		0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0		0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0		0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah		0	0	0		0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus		0	0	0		0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta		0	0	0		0	0	0
6. Dana Desa		0	0	0		0	0	0
7. Insentif Fiskal		0	0	0		0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	119,516,412,000	114,201,401,043	(5,315,010,957)	96		0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0		0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA 147
ESELON I : KEMENTERIAN PARIWISATA 01
SATUAN KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG 694453

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 9:08 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,461,900,000	15,806,255,424	3,344,355,424	127	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,461,900,000	15,806,255,424	3,344,355,424	127	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12,461,900,000	15,806,255,424	3,344,355,424	127	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	119,516,412,000	114,201,401,043	(5,315,010,957)	96	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	41,097,296,000	39,215,159,133	(1,882,136,867)	95	0	0	0	0
2. Belanja Barang	67,384,116,000	63,963,988,708	(3,420,127,292)	95	0	0	0	0
3. Belanja Modal	11,035,000,000	11,022,253,202	(12,746,798)	100	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA	: 147	KEMENTERIAN PARIWISATA	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	KEMENTERIAN PARIWISATA	Tanggal : 06/05/26 9:10 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 694453	POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12,680,899,000	12,158,874,000	12,158,874,000	175,600	12,158,898,400	100	175,600
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	176,000	188,000	147,233	2,081	145,152	77.21	42,848
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	984,252,000	1,054,570,000	848,254,860	0	848,254,860	80.44	206,315,140
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	292,664,000	303,573,000	209,409,869	0	209,409,869	68.98	94,163,131
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	108,224,000	115,955,000	63,190,000	0	63,190,000	54.5	52,765,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,230,931,000	1,318,873,000	1,144,385,000	0	1,144,385,000	86.77	174,488,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	87,133,000	150,639,000	149,403,049	0	149,403,049	99.18	1,235,951
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	719,773,000	771,196,000	559,926,260	0	559,926,260	72.6	211,269,740
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,795,999,000	1,781,512,000	1,754,634,391	0	1,754,634,391	98.49	26,877,609
511129	Belanja Uang Makan PNS	358,580,000	384,198,000	224,095,000	740,056	223,354,944	58.14	160,843,056
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4,987,519,000	5,343,847,000	5,116,185,585	0	5,116,185,585	95.74	227,661,415
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	23,246,150,000	23,383,425,000	22,228,505,247	917,737	22,227,587,510	95.06	1,155,837,490
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,179,288,000	1,895,789,000	1,884,187,054	934,948	1,883,252,106	99.34	12,536,894
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	27,000	34,000	32,289	0	32,289	94.97	1,711
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	47,995,000	145,622,000	133,434,682	0	133,434,682	91.63	12,187,318
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	19,245,000	38,950,000	38,726,545	0	38,726,545	99.43	223,455
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	158,796,000	182,567,000	182,456,247	0	182,456,247	99.94	110,753
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	63,122,000	128,810,000	116,885,880	0	116,885,880	90.74	11,924,120
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	269,042,000	458,182,000	358,092,000	0	358,092,000	78.15	100,090,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,737,515,000	2,849,954,000	2,713,814,697	934,948	2,712,879,749	95.19	137,074,251
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116							
5122	Belanja Lembur	277,406,000	166,727,000	11,450,000	0	11,450,000	6.87	155,277,000
512211	Belanja Uang Lembur	277,406,000	166,727,000	11,450,000	0	11,450,000	6.87	155,277,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio	11,229,095,000	12,130,961,000	12,130,472,526	0	12,130,472,526	100	488,474
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,607,760,000	2,586,229,000	2,132,769,348	0	2,132,769,348	83.11	433,459,652
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	12,836,855,000	14,697,190,000	14,263,241,874	0	14,263,241,874	97.05	433,948,126
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	38,097,926,000	41,097,296,000	39,217,011,818	1,852,685	39,215,159,133	95.42	1,882,136,867
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	12,324,628,000	14,076,089,000	14,007,649,315	0	14,007,649,315	99.51	68,439,685
521111	Belanja Keperluan Perkantoran							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 147	KEMENTERIAN PARIWISATA	Kode Lap : LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	KEMENTERIAN PARIWISATA	Tanggal : 06/05/26 9:10 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT	Halaman : 2
SATUAN KERJA	: 694453	POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG	Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	10,000,000	4,483,139	0	4,483,139	44.83	5,516,861
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	309,240,000	305,240,000	290,700,000	0	290,700,000	95.24	14,540,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	20,000,000	19,680,000	0	19,680,000	98.4	320,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	12,634,868,000	14,411,329,000	14,322,512,454	0	14,322,512,454	99.38	88,816,546
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	8,316,567,000	2,828,578,000	2,172,526,886	0	2,172,526,886	76.81	656,051,114
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,021,195,000	3,416,284,000	3,198,361,866	50,810,000	3,147,551,866	92.13	268,732,134
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	911,492,000	1,215,590,000	1,144,846,550	0	1,144,846,550	94.18	70,743,450
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	900,000	855,000	0	855,000	95	45,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	17,249,254,000	7,461,352,000	6,516,590,302	50,810,000	6,465,780,302	86.66	995,571,698
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,999,799,000	11,918,461,000	11,895,410,566	0	11,895,410,566	99.81	23,050,434
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	9,999,799,000	11,918,461,000	11,895,410,566	0	11,895,410,566	99.81	23,050,434
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,560,000,000	1,560,000,000	1,373,892,849	0	1,373,892,849	88.07	186,107,151
522112	Belanja Langganan Telepon	40,800,000	38,800,000	13,725,502	0	13,725,502	35.38	25,074,498
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	103,860,000	0	0	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	449,500,000	217,010,000	213,797,000	98,825,000	114,972,000	52.98	102,038,000
522141	Belanja Sewa	3,610,081,000	1,304,567,000	1,122,397,773	0	1,122,397,773	86.04	182,169,227
522151	Belanja Jasa Profesi	2,399,830,000	1,450,335,000	998,270,000	1,800,000	996,470,000	68.71	453,865,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,749,970,000	11,071,649,000	10,982,580,247	0	10,982,580,247	99.2	89,068,753
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,914,041,000	15,642,361,000	14,704,663,371	100,625,000	14,604,038,371	93.36	1,038,322,629
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,947,705,000	6,051,794,000	5,549,240,003	0	5,549,240,003	91.7	502,553,997
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,305,501,000	3,433,797,000	3,161,001,455	0	3,161,001,455	92.06	272,795,545
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,253,206,000	9,485,591,000	8,710,241,458	0	8,710,241,458	91.83	775,349,542
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,754,698,000	6,802,941,000	6,577,533,216	120,343,500	6,457,189,716	94.92	345,751,284
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,720,000	20,000	0	0	0	0	20,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	819,959,000	454,379,000	421,169,092	6,860,000	414,309,092	91.18	40,069,908
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,882,968,000	486,656,000	470,378,060	0	470,378,060	96.66	16,277,940
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	12,470,345,000	7,743,996,000	7,469,080,368	127,203,500	7,341,876,868	94.81	402,119,132
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	704,822,000	721,026,000	678,761,629	54,632,940	624,128,689	86.56	96,897,311

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 147	KEMENTERIAN PARIWISATA	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	KEMENTERIAN PARIWISATA	Tanggal	: 06/05/26 9:10 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT	Halaman	: 3
SATUAN KERJA	: 694453	POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	704,822,000	721,026,000	678,761,629	54,632,940	624,128,689	86.56	96,897,311
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	69,216,335,000	67,384,116,000	64,297,260,148	333,271,440	63,963,988,708	94.92	3,420,127,292
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000,000	5,651,000,000	5,644,431,800	0	5,644,431,800	99.88	6,568,200
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000,000	5,651,000,000	5,644,431,800	0	5,644,431,800	99.88	6,568,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,600,000,000	5,163,300,000	5,157,327,531	0	5,157,327,531	99.88	5,972,469
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	270,000,000	165,000,000	164,811,706	0	164,811,706	99.89	188,294
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	130,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	6,000,000,000	5,328,300,000	5,322,139,237	0	5,322,139,237	99.88	6,160,763
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	55,700,000	55,682,165	0	55,682,165	99.97	17,835
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	55,700,000	55,682,165	0	55,682,165	99.97	17,835
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	11,000,000,000	11,035,000,000	11,022,253,202	0	11,022,253,202	99.88	12,746,798
	JUMLAH BELANJA	118,314,261,000	119,516,412,000	114,536,525,168	335,124,125	114,201,401,043	95.55	5,315,010,957

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 147
: 01
: 0200
: 694453

KEMENTERIAN PARIWISATA
KEMENTERIAN PARIWISATA
JAWA BARAT
POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 9:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	0	199,790,000	0	199,790,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	168,000,000	253,543,000	0	253,543,000	150.92
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2	0	2	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	168,000,000	453,333,002	0	453,333,002	269.84
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	925,000,000	695,500,000	0	695,500,000	75.19
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	9,741,400,000	11,562,275,000	0	11,562,275,000	118.69
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	1,627,500,000	1,868,364,628	0	1,868,364,628	114.8
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	12,293,900,000	14,126,139,628	0	14,126,139,628	114.9
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	45,756,645	0	45,756,645	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	45,756,645	0	45,756,645	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,000,000	0	7,000,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	215,492,756	0	215,492,756	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	958,533,393	0	958,533,393	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,181,026,149	0	1,181,026,149	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,461,900,000	15,806,255,424	0	15,806,255,424	126.84
	JUMLAH PENDAPATAN	12,461,900,000	15,806,255,424	0	15,806,255,424	126.84